



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019**



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050/Kep.27.a-Bappelitbangda/2019
LAMPIRAN :

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 9, Seri E.4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 21, Seri E.).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kabupaten Cirebon, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kabupaten Cirebon.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Lampiran : Keputusan Bupati Cirebon
 Nomor : 050/Kep.27.a-Bappelitbangda/2019
 Tanggal : 31 Januari 2019
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Tahun Anggaran 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN CIREBON
 TAHUN ANGGARAN 2019**

Misi 1: Meningkatkan SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	Angka melek huruf Al-Quran lulusan SD/MD	Lulusan SD yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim	%	70
		Angka Melek huruf Al-Quran lulusan SMP	Lulusan SMP yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim	%	75
		Angka Melek huruf Al-Quran lulusan SMA	Lulusan SMA yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim	%	80
		Angka Melek huruf Al-Quran lulusan SMK	Lulusan SMK yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim	%	80
		Jumlah siswa yang hafal juz 'amma	Prosentase Siswa muslim lulusan SLTP dan	%	5

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		pada pendidikan SLTP dan SLTA	SLTA yang hafal juz 'amma		
		Jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da maghrib mengaji	DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da maghrib mengaji	DKM	424
		Jumlah penghafal Al-Qur'an	Jumlah penghafal Al-Qur'an yang dihasilkan pada tahun berjalan	Orang	1.216
		Prestasi lomba keagamaan tingkat Provinsi Jawa Barat	Perolehan peringkat MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat	Peringkat	5 Besar
		Jumlah kasus konflik yang bernuansa agama	Ada atau tidak adanya kejadian konflik agama	Kasus	4

Misi 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu dan berketrampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya pelayanan pendidikan untuk semua	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	%	85,67-86,67
		Angka Melek Huruf (AMH) pada penduduk usia 15 tahun keatas	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang buta huruf dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	%	95,74
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,03
		Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA	Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA/SMK	%	130 110 81

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Statgis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA - SMK	Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan SMA/SMK	%	99,96 90,50 62,76 48,95
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per-usia tingkatan sekolah - SD - SMP - SMA/SMK	Ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per-usia tingkatan sekolah Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap Jumlah penduduk usia sekolah SD (7-12 tahun) Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMP (13-15 tahun) Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun)	%	50 20 23
2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	-	Tahun	67
		Ratio Kematian Ibu	Jumlah ibu melahirkan dalam keadaan meninggal dunia pada saat melahirkan dibandingkan jumlah seluruh ibu melahirkan	Point	76,29
		Ratio kematian Bayi	Jumlah bayi yang dilahirkan dalam keadaan meninggal dibagi seluruh jumlah kelahiran bayi	Point	3,810
		Balita gizi buruk (BB/TB)	Berat badan dibandingkan dengan Tinggi badan. Data balita dihitung dari jumlah	%	0,61

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
			balita yang ditimbang		
		Cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar	Jumlah penduduk miskin yang berobat di PKM dibagi total penduduk yang mendapat jaminan kesehatan	Orang	1.345.865
		Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Jumlah rumah sakit (swasta dan negeri) yang ada di Kabupaten Cirebon	%	0,052
		Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Jumlah puskesmas, klinik (swasta dan negeri), dan puskesmas pembantu yang ada di Kabupaten Cirebon	%	0,053
		Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan	-	Unit	57
		Rasio dokter terhadap penduduk	Jumlah seluruh dokter yang bertugas di Kabupaten Cirebon	%	0,137
		Rasio paramedis terhadap penduduk	Jumlah seluruh paramedic yang bertugas di Kabupaten Cirebon	%	1,574
		Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dibandingkan seluruh jumlah penduduk Kabupaten Cirebon	%	1.345.000
		Jumlah Posyandu Purnama	Akumulasi jumlah posyandu setiap tahun	Unit	769
3.	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketerampilan, dan berjiwa kewirausahaan	Jumlah kawasan seni	Kawasan seni merupakan hamparan wilayah yang meliputi beberapa desa terdekat. Lokasi kawasan seni ada 2: Gegesik (Gegesik Wetan, Kidul, Kulon, Lor, Kidul, dan Panunggul) dan Trusmi (Trusmi Wetan, Trusmi Kulon, Panembahan, dan Kalitengah)	Kawasan	1
		Jumlah pertunjukan/	-	Kali	1

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Stategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		pagelaran/festival budaya tingkat nasional			
		Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (SPM)	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi	%	75
			Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan kewirausahaan	%	75
			Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	55
			Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	75
			Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program Jamsostek	%	60
			Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	60
			Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan	%	65
			Jumlah wirausahawan baru	Wirausaha baru setiap tahun	Orang
		Angka pengangguran terbuka	Jumlah Pengangguran terbuka tiap tahun	%	8,7
4.	Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Kenaikan kunjungan wisatawan setiap tahun	%	10
5.	Terwujudnya peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga	Prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Barat	Peringkat prestasi olahraga yang mendapat medali dalam pertandingan tingkat Jawa Barat	POPDA	-
				PORDA	-

Misi 3: Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan koneksitas antar wilayah	Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Akumulasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	646,65
		Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik	Akumulasi panjang jalan poros desa dalam kondisi baik	Km	468,07
2.	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	Panjang saluran induk	Akumulasi panjang saluran induk dalam kondisi baik	Km	78,102
		Panjang saluran sekunder	Akumulasi panjang saluran sekunder dalam kondisi baik	Km	39,464
		Bangunan jaringan irigasi	Prosentase bangunan jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	100
		Jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari	Akumulasi RT yang terlayani air bersih	Rumah Tangga	210.700
		Jumlah daerah rawan banjir	-	Kecamatan	-
		Prosentase pengangkutan sampah	Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk daerah layanan persampahan	%	52
		Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm,selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	Jumlah kumulatif penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase dibagi jumlah kumulatif masyarakat seluruh kota	%	50

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)	Persentase Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (3R) dibagi dengan total jumlah penduduk	%	20
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya	%	84
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten(pos jaga)	Cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan bencana kebakaran dengan wilayah manajemen kebakaran yang ditandai dengan ketersediaan pos jaga dan prasarana pendukung lainnya	Pos Jaga	14
3.	Terwujudnya Cirebon yang bersih, Asri dan lestari	Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri	Kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas 3R	Kelompok	8
		Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Kecamatan yang memiliki RTH \geq 1 Ha	Kecamatan	40
		Prosentase kawasan lindung	-	%	30
		Penghargaan Adipura	Piala adipura	Kali	1
		Jumlah sungai yang memenuhi kualitas baku mutu air	Sungai yang dipantau kualitas airnya	Sungai	5
		Jumlah industri yang memenuhi kualitas baku mutu udara	Industri yang mempunyai cerobong asap	Industri	25
		Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan	Menyelesaikan pengaduan kasus pencemaran lingkungan	Pengaduan	12

Misi 4 : Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik dan komuniti)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah komunitas	-	Komunitas	92
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	Kelompok	92
		Jumlah lembaga ekonomi pedesaan	-	Lembaga	424

Misi 5 : Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Nilai PDRB	Bersumber dari BPS Kab. Cirebon	Rp (dalam juta)	12.847.447
		Laju Pertumbuhan Ekonomi(LPE)	Bersumber dari BPS Kab. Cirebon	%	5,55
		PDRB per kapita	Bersumber dari BPS Kab. Cirebon	Rp	21.568.345
		Tingkat inflasi	Data inflasi merujuk pada tingkat inflasi Kota Cirebon	%	3,5-4,5
		Jumlah daerah rawan pangan	-	Desa	7
		Nilai investasi	Investasi yang terdaftar di BPPT	Rp (dalam juta)	1.492.239

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Prosentase Koperasi aktif	Prosentase koperasi yang aktif terhadap jumlah koperasi yang ada	%	100,00
		Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan	-	Lokasi	8
2.	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Prosentase penduduk miskin setiap tahun	%	11,65
		Meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk	-	%	100,00

Misi 6 : Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala 1-4	Point	4,25
		Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM	-	Unit	11
		Kecamatan yang menjalankan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terdapat 120 indikator kinerja	Kecamatan	40
2.	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai	-	%	3,7
		Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/latar pendidikan	-	%	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Stategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
3.	Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	Rata-rata capaian kinerja SKPD	-	%	70-75
		Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK)	-	Kriteria	Baik
		Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal	-	%	5
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	%	15


 BUPATI CIREBON,

 JICKY SAROMI



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050/Kep.274-Bappelitbangda/2019
LAMPIRAN :

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:
- 1) Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
 - 2) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
 - 3) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, maka Indikator Kinerja Utama Perubahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 9, Seri E.4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 6, Seri A.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kabupaten Cirebon, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Lampiran : Keputusan Bupati Cirebon

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2019**

Misi 1: Meningkatkan SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	Angka melek huruf Al-Quran lulusan SD/MD	Lulusan SD yang bisa baca Al-Qur'an /seluruh lulusan bagi siswa muslim	%	70
		Angka Melek huruf Al-Quran lulusan SMP	Lulusan SMP yang bisa baca Al-Qur'an /seluruh lulusan bagi siswa muslim	%	75
		Angka Melek huruf Al-Quran lulusan SMA	Lulusan SMA yang bisa baca Al-Qur'an /seluruh lulusan bagi siswa muslim	%	80

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Stategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Angka Melek huruf Al-Quran lulusan SMK	Lulusan SMK yang bisa baca Al-Qur'an /seluruh lulusan bagi siswa muslim	%	80
		Jumlah siswa yang hafal juz 'amma pada pendidikan SLTP dan SLTA	Prosentase Siswa muslim lulusan SLTP dan SLTA yang hafal juz 'amma	%	5
		Jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da maghrib mengaji	DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da maghrib mengaji	DKM	424
		Jumlah penghafal Al-Qur'an	Jumlah penghafal Al-Qur'an yang dihasilkan pada tahun berjalan	Orang	1.216
		Prestasi lomba keagamaan tingkat Provinsi Jawa Barat	Perolehan peringkat MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat	Peringkat	5 Besar
		Jumlah kasus konflik yang bernuansa agama	Ada atau tidak adanya kejadian konflik agama	Kasus	4

Misi 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu dan berketrampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya pelayanan pendidikan untuk semua	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	%	85,67- 86,67
		Angka Melek Huruf (AMH) pada penduduk usia 15 tahun keatas	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang buta huruf dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	%	95,74
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,03
		Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA	Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA/SMK	%	130 110 81
		Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA - SMK	Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan SMA/SMK	%	99,96 90,50 62,76 48,95

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per-usia tingkatan sekolah	Ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per-usia tingkatan sekolah	%	
		- SD	Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap Jumlah penduduk usia sekolah SD (7-12 tahun)		50
		- SMP	Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMP (13-15 tahun)		20
		- SMA/SMK	Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun)		23
2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	-	Tahun	67
		Ratio Kematian Ibu	Jumlah ibu melahirkan dalam keadaan meninggal dunia pada saat melahirkan dibandingkan jumlah seluruh ibu melahirkan	Point	76,29
		Ratio kematian Bayi	Jumlah bayi yang dilahirkan dalam keadaan meninggal dibagi	Point	3,810

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
			seluruh jumlah kelahiran bayi		
		Balita gizi buruk (BB/TB)	Berat badan dibandingkan dengan Tinggi badan. Data balita dihitung dari jumlah balita yang ditimbang	%	0,61
		Cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar	Jumlah penduduk miskin yang berobat di PKM dibagi total penduduk yang mendapat jaminan kesehatan	Orang	1.345.865
		Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Jumlah rumah sakit (swasta dan negeri) yang ada di Kabupaten Cirebon	%	0,052
		Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Jumlah puskesmas, klinik (swasta dan negeri), dan puskesmas pembantu yang ada di Kabupaten Cirebon	%	0,053
		Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan	-	Unit	57
		Rasio dokter terhadap penduduk	Jumlah seluruh dokter yang bertugas di Kabupaten Cirebon	%	0,137
		Rasio paramedis terhadap penduduk	Jumlah seluruh paramedis yang bertugas di Kabupaten Cirebon	%	1,574

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dibandingkan seluruh jumlah penduduk Kabupaten Cirebon	%	1.345.000
		Jumlah Posyandu Purnama	Akumulasi jumlah posyandu setiap tahun	Unit	769
3.	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketerampilan, dan berjiwa kewirausahaan	Jumlah kawasan seni	Kawasan seni merupakan hamparan wilayah yang meliputi beberapa desa terdekat. Lokasi kawasan seni ada 2: Gegesik (Gegesik Wetan, Kidul, Kulon, Lor, Kidul, dan Panunggul) dan Trusmi (Trusmi Wetan, Trusmi Kulon, Panembahan, dan Kalitengah)	Kawasan	1
		Jumlah pertunjukan/pagelaran/festival budaya tingkat nasional	-	Kali	1
		Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (SPM)	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi	%	75
			Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan kewirausahaan	%	75

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
			Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	55
			Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	75
			Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program Jamsostek	%	60
			Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	60
			Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan	%	65
		Jumlah wirausahawan baru	Wirausaha baru setiap tahun	Orang	100
		Angka pengangguran terbuka	Jumlah Pengangguran terbuka tiap tahun	%	8,7
4.	Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Kenaikan kunjungan wisatawan setiap tahun	%	10
5.	Terwujudnya peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga	Prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Barat	Peringkat prestasi olahraga yang mendapat medali dalam pertandingan tingkat Jawa Barat	POPDA	-
				PORDA	-

Misi 3: Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan koneksitas antar wilayah	Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Akumulasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	646,65
		Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik	Akumulasi panjang jalan poros desa dalam kondisi baik	Km	468,07
2.	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	Panjang saluran induk	Akumulasi panjang saluran induk dalam kondisi baik	Km	78,102
		Panjang saluran sekunder	Akumulasi panjang saluran sekunder dalam kondisi baik	Km	39,464
		Bangunan jaringan irigasi	Prosentase bangunan jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	100
		Jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari	Akumulasi RT yang terlayani air bersih	Rumah Tangga	210.700
		Jumlah daerah rawan banjir	-	Kecamatan	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Prosentase pengangkutan sampah	Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk daerah layanan persampahan	%	52
		Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm,selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	Jumlah kumulatif penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase dibagi jumlah kumulatif masyarakat seluruh kota	%	50
		Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)	Persentase Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (3R) dibagi dengan total jumlah penduduk	%	20
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya	%	84
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten(pos	Cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan	Pos Jaga	14

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Stategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		jaga)	bencana kebakaran dengan wilayah manajemen kebakaran yang ditandai dengan ketersediaan pos jaga dan prasarana pendukung lainnya		
3.	Terwujudnya Cirebon yang bersih, Asri dan lestari	Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri	Kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas 3R	Kelompok	8
		Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Kecamatan yang memiliki RTH \geq 1 Ha	Kecamatan	40
		Prosentase kawasan lindung	-	%	30
		Penghargaan Adipura	Piala adipura	Kali	1
		Jumlah sungai yang memenuhi kualitas baku mutu air	Sungai yang dipantau kualitas airnya	Sungai	5
		Jumlah industri yang memenuhi kualias baku mutu udara	Industri yang mempunyai cerobong asap	Industri	25
		Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan	Menyelesaikan pengaduan kasus pencemaran lingkungan	Pengaduan	12

Misi 4 : Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik dan komuniti)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Stategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah komunitas	-	Komunitas	92
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	Kelompok	92
		Jumlah lembaga ekonomi pedesaan	-	Lembaga	424

Misi 5 : Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Stategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Nilai PDRB	Bersumber dari BPS Kab. Cirebon	Rp (dalam juta)	12.847.447
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Bersumber dari BPS Kab. Cirebon	%	5,55

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		PDRB per kapita	Bersumber dari BPS Kab. Cirebon	Rp	21.568.345
		Tingkat inflasi	Data inflasi merujuk pada tingkat inflasi Kota Cirebon	%	3,5-4,5
		Jumlah daerah rawan pangan	-	Desa	7
		Nilai investasi	Investasi yang terdaftar di BPPT	Rp (dalam juta)	1.492.239
		Prosentase Koperasi aktif	Prosentase koperasi yang aktif terhadap jumlah koperasi yang ada	%	100,00
		Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan	-	Lokasi	8
2.	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Prosentase penduduk miskin setiap tahun	%	11,65
		Meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk	-	%	100,00

Misi 6 : Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala 1-4	Point	4,25
		Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM	-	Unit	11
		Kecamatan yang menjalankan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terdapat 120 indikator kinerja	Kecamatan	40
2.	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai	-	%	3,7
		Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/latar pendidikan	-	%	100
3.	Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	Rata-rata capaian kinerja SKPD	-	%	70-75
		Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK)	-	Kriteria	Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Stategis	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal	-	%	5
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	%	15


 BUPATI CIREBON,
Drs. H. IMRON, M.Ag

